

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagai Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) pelaksana kegiatan teknis berkaitan dengan infrastruktur dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki beberapa kendala permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	1. Belum optimalnya akses dan kualitas infrastruktur jalan	a. Infrastruktur jalan belum menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten b. Ketersediaan jalan masih rendah c. Ketersediaan jalan belum terintegrasi dengan bagian-bagian jalan d. Lebar jalan belum memenuhi standar jalan kabupaten e. Kecepatan ruas jalan belum memenuhi standar kecepatan jalan kabupaten f. Masih terdapat jembatan yang lebarnya kurang dari 5,5 m atau lebih rendah dari lebar jalan existing g. Kualitas dan ketahanan umur jalan masih rendah h. Kualitas dan ketahanan umur bangunan pelengkap jalan masih rendah
		2. Belum optimalnya layanan infrastruktur sumber daya air	a. Jaringan irigasi belum seluruhnya menjangkau seluruh areal pertanian beririgasi/sawah b. Masih rendahnya jaringan irigasi yang terintegrasi dengan kelengkapan jaringan irigasi c. Saluran irigasi dan bangunan irigasi belum berfungsi dengan baik d. Saluran irigasi dan bangunan irigasi belum berfungsi dengan baik e. Masih rendahnya ketersediaan air irigasi selain dari mata air dan sungai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			f. Rendahnya ketersediaan air irigasi pada musim kemarau g. Belum optimalnya konservasi sumber daya air h. Belum seluruh lahan sawah terakses air irigasi i. Masih terdapat konflik pemanfaatan air untuk air minum dan air irigasi j. Belum optimalnya kelembagaan petani pengelola air irigasi
		3. Belum optimalnya penataan bangunan gedung dan lingkungan	a. Bangunan gedung pemerintahan dan publik belum memadai b. Kawasan perbatasan belum terbangun landmark yang baik c. Perlu dibangunnya landmark di kabupaten magelang d. Menurunnya kondisi baik bangunan gedung pemerintah e. Belum optimalnya penerbitan sertifikat layak fungsi bangunan
		4. Belum optimalnya layanan air minum dan sanitasi **	a. Belum tercapainya layanan air minum 100% b. Belum tercapainya layanan sanitasi 100% c. Belum optimalnya penanganan genangan kawasan
		5. Belum optimalnya kualitas konstruksi dan sarana prasarana ke PU-an	a. Sarana dan prasarana Ke-PU an yang belum memadai b. Belum optimalnya fungsi penyedia jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan bidang ke-Puan c. Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan bidang ke-Puan
		6. Belum optimalnya kesesuaian tata ruang	a. Belum optimalnya fasilitasi pelayanan rekomendasi perijinan b. Belum optimalnya pengendalian Pemanfaatan ruang c. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan ijin pemanfaatan ruang d. Belum tersampainya informasi mekanisme pelayanan perijinan ke masyarakat e. Belum optimalnya fasilitasi pembebasan tanah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2019-2024 adalah:

**“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera,
Berdaya saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”.**

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024, maka misi pembangunan Kabupaten Magelang dijabarkan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.

Salah satu indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen yang sangat menentukan tercapainya peningkatan IPM adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar, mencakup pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan IPM. Komponen pendidikan dalam mewujudkan peningkatan IPM dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan pendidikan, komponen kesehatan dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan kesehatan, sedangkan komponen daya beli masyarakat dilakukan melalui penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peningkatan ketahanan pangan daerah dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Adapun upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dilakukan dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama yang mencakup sarana prasarana publik terkait peribadatan dan perhatian pemerintah daerah terhadap para pelaku pembinaan masyarakat baik organisasi masyarakat maupun pribadi masyarakat.

2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi diantaranya adalah dengan meningkatkan daya saing kemampuan ekonomi daerah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan ekonomi antara lain pengembangan pertanian pariwisata dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pengembangan sarana dan prasarana publik, serta pengembangan kepemudaan dan olahraga. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik dan pelestarian lingkungan hidup.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Pada periode yang lalu tata kelola pemerintahan Kabupaten Magelang telah berjalan dengan baik yang diindikasikan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah. Dalam periode 2019-2024 mendatang tata kelola pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan reformasi birokrasi secara optimal.

Reformasi birokrasi ke depan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan *smart regency* dimana pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dapat diakses dan dikontrol oleh masyarakat. Pelayanan publik yang partisipatif dilaksanakan melalui pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan berbagai media. Sedangkan pelayanan publik yang inovatif dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional serta optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan.

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”					
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup	Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah	Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang		
	1) Sarana dan Prasarana Publik				

	<p>a. Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, irigasi, dan sarana ekonomi);</p> <p>b. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh wilayah kabupaten magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah</p>	a. Perumusan kebijakan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, pertanahan, dan kesekretariatan ;	Belum optimalnya akses dan kualitas infrastruktur jalan	Borobudur sebagai KSPN Pariwisata	Kendaraan tambang pasir batu dari merapi yang melebihi batas tonase maksimal
			Belum optimalnya layanan infrastruktur sumber daya air	Banyaknya potensi dan Sumber daya mata air di Kabupaten Magelang	Belum optimalnya peran kelembagaan pemanfaat air
		b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan;	Belum optimalnya penataan bangunan gedung dan lingkungan	Perda Bangunan Gedung	- Masih rendahnya kualitas hasil penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah.
		c. Pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan;	Belum optimalnya layanan air minum dan sanitasi **	Adanya kelembagaan masyarakat pada BPSAM dan BP Sanitasi	- Tidak seluruh wilayah di Kabupaten memiliki sumber mata air - Belum terbangunnya IPLT - Terbatasnya lahan pembangunan IPAL
		d. Pelaksanaan administrasi bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan;	Belum optimalnya kualitas konstruksi dan sarana prasarana ke-Puan	- UU Jasa Konstruksi - Mendorong peningkatan Uji Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi.	Masih rendahnya motivasi untuk memperoleh Uji Kompetensi
		e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	Belum optimalnya kesesuaian tata ruang	Adanya Pelayanan terpadu satu pintu berbasis sistem	Belum optimalnya standar pelayanan perijinan pemanfaatan tata ruang
		f. Pengendalian penyelenggaraa n tugas Unit Pelaksana Teknis;			
		g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan;			

		<p>h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan; dan</p> <p>i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>			
--	--	--	--	--	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Tabel 3.3
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

No	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	Mewujudkan bangsa yang berdayasaing	<p>1. Meningkatkan kinerja jalan dan jembatan sebagai jalan kolektor sekunder,</p> <p>2. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi **</p> <p>3. Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung</p>	<p>Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah</p>	<p>Belum optimalnya akses dan kualitas infrastruktur jalan</p>	<p>Borobudur sebagai KSPN Pariwisata</p>	<p>Kendaraan tambang pasir batu dari merapi yang melebihi batas tonase maksimal</p>
		<p>4. Meningkatkan pengembangan Jasa Konstruksi untuk menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan</p>	<p>Fungsi Perangkat daerah:</p> <p>a. Perumusan kebijakan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, pertanahan, dan kesekretariatan;</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi</p>	<p>Belum optimalnya layanan air minum dan sanitasi **</p>	<p>Adanya kelembagaan masyarakat pada BPSAM dan BP sanitasi</p>	<p>- Tidak seluruh wilayah di Kabupaten memiliki sumber mata air</p> <p>- Belum terbangunnya IPLT</p> <p>- Terbatasnya lahan pembangunan IPAL</p>

No	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
		berorientasi pada pelayanan prima	kebijakan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan;	Belum optimalnya penataan bangunan gedung dan lingkungan	Perda Bangunan Gedung	- Masih rendahnya kualitas hasil penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah.
		5. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energy	c. Pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan;	Belum optimalnya kualitas konstruksi dan sarana prasarana ke-Puan	- UU Jasa Konstruksi - Mendorong peningkatan Uji Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi.	Masih rendahnya motivasi untuk memperoleh Sertifikat Uji Kompetensi
		6. Penyelesaian revisi RTRWP maupun RTRW Kab/Kota	d. Pelaksanaan administrasi bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan;	Belum optimalnya layanan infrastruktur sumber daya air	Banyaknya potensi dan Sumber daya mata air di Kabupaten Magelang	Belum optimalnya peran kelembagaan pemanfaat air
			e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;	Belum optimalnya kesesuaian tata ruang	Adanya Pelayanan terpadu satu pintu berbasis sistem	Belum optimalnya standar pelayanan perijinan pemanfaatan tata ruang
			f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis;			
			g. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan;			
			h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan;			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Berikut faktor-faktor yang menghambat dan mendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD. Apabila PD tidak berkorelasi dengan kebijakan dalam RTRW dan hasil KLHS, maka pada bagian ini diberi penjelasan. Telaah dapat dilakukan dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 3.4
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG	Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah			
	Studi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bandongan, Sawangan (PPL)		RDTR Bandongan dan Sawangan belum bisa disusun		Masih menunggu revisi RTRW
	Studi Rencana Detail Tata Ruang Perdesaan (PPL)		RDTR Perdesaan belum bisa disusun		Masih menunggu revisi RTRW
2	Perwujudan Sistem Prasarana				
	Peningkatan jalan lingkaran barat Gulon-Ngawen-ke arah Pasar		Kemacetan di jalan nasional Salam-Muntilan	Eksisting jalan lingkaran	Padatnya permukiman disekitar jalan lingkaran
3	Pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan				
	Pengembangan pengelolaan limbah dari permukiman perkotaan dengan sistem sanitasi IPAL dan IPLT		Belum tercapainya pelayanan sanitasi limbah domestik masyarakat	Merupakan tujuan SDGs Tersedianya dokumen perencanaan masterplan air limbah	<ul style="list-style-type: none">• Belum terbangunnya IPLT• Terbatasnya lahan pembangunan IPAL

KLHS

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua (6.1)		Belum tercapainya akses universal untuk seluruh rumah tangga baik perkotaan dan pedesaan terhadap layanan air minum layak	Program penyediaan air bersih dari pusat Bisnis plan PDAM	Tidak seluruh wilayah di Kabupaten memiliki sumber mata air
2	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan		<ul style="list-style-type: none">• Belum terpenuhinya 100% akses rumah tangga		Masih rendahnya Perilaku hidup sehat di masyarakat

	menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan (6.2)		<p>terhadap layanan sanitasi layak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum seluruh Desa/kelurahan melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). • Masih adanya Desa/kelurahan yang melakukan BABs. • Belum terdapat fasilitas infrastruktur layanan air limbah sistem terpusat 		
	Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.		<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya fasilitas IPLT daerah • Masih rendahnya indeks kualitas air sebagai sumber air baku • Keterbatasan kuantitas ketersediaan air baku untuk air minum di wilayah tertentu • Rendahnya Sumber Daya Manusia pengelola sarana prasarana air minum dan sanitasi 		<p>Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik</p> <p>Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan KLHS.</p>

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Magelang didasarkan pada permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan, dan potensi pembangunan yang belum terkelola dan dapat menjadi peluang untuk dikembangkan di masa datang. Isu strategis yang perlu mendapat prioritas penanganan selama kurun waktu 5 tahun mendatang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang di Kabupaten Magelang diantaranya adalah belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur.

Jenis dan layanan infrastruktur yang dimaksud antara lain adalah transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah di mana semua

dilaksanakan secara terintegrasi dengan meningkatkan peran kerja sama pemerintah-swasta. Kerja sama pemerintah dan swasta ditujukan untuk meningkatkan jumlah dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas dan mobilitasnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Magelang dengan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Dari jenis dan layanan infrastruktur yang menjadi isu strategis, terdapat 2 jenis pelayanan dasar yang harus memenuhi standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum tingkat kabupaten, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari **, dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik **.